

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Debitur dan Kreditur

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pasal 1 ayat (2) & (3) secara pengertian sebagai berikut :

1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan
2. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

B. Tinjauan tentang Konsumen dan pelaku usaha

1. Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.⁸ Begitu pula kamus besar bahasa inggris-indonesia yang memberi kata arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Pengertian konsumen di amerika serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai” Namun. Di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1

korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.⁹

Kitab Undang-Undang hukum perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu; pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam dan sebagainya. Adapun dalam istilah kitab undang-undang hukum dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.

Black's Law Dictionary memdefinisikan konsumen sebagai berikut : *a person whou buys goods or service for personal, family or house hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose.*¹⁰ Sedangkan dalam *text book on Consumer Law*, Konsumen adalah *who one purchases goods or service.*¹¹

Definisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/ atau pebisnis.¹²

Dalam naskah- naskah akademik dan/ atau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, cukup banyak dibahas dan dibicarakan tentang berbagai peristilahan yang termasuk dalam lingkup perlindungan

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 22

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*. (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004) Eight Edition, h.335

¹¹ Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995) h. 124

¹² *The consumer must be an individual or other protected person who does not act in business capacity*. David Oughton dan Jhon Lowry, *Textbook on Consumer Law*, (London: Blackstone Press Limited, 1997), h. 1-2

konsumen. Dari naskah-naskah akademik itu yang patut mendapat perhatian, antara lain¹³ :

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman (BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjual belikan
- b. Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia: pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- c. Sedang dalam naskah akademis yang di persiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) Bekerja sama dengan departemen perdagangan RI, berbunyi :

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai barang akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun di-peroleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.¹⁴

Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu : Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.¹⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen¹⁶ menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/ atau jasa

¹³ ibid

¹⁴ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana. Hal.16

¹⁵ *Ibid.*

yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan dari pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu: ¹⁷

- 1) Konsumen komersil (*Commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang/ atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- 2) Konsumen antara (*Intermediate consume*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir (*Ultimate konsumen/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

2. Pelaku usaha

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

¹⁶ Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa, yang berkonotasi pada konsumen akhir (*end user/ultimate consumer*). Lihat Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Az. Nasution, 2002 *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit. hal 13.

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Kajian atau perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian “Produsen” meliputi:¹⁸

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan di masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
- c. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.cit.* hal 41-42

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.

3. Pengertian Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Unsur-unsur definisi konsumen¹⁹:

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang khusus bestatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang atau individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.* Hal. 27-30

eksplisit membedakan kedua pengertian *persoon* di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/ atau jasa itu.

c. Barang dan/ atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/ atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.

Sementara itu, jasa diartikan sebagai pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya perusahaan pengembang (*developer*) perusahaan sudah biasamengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang di perjual belikan bukan suatu sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup Lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/ atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya.

f. Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup menjelaskan maksud isi dalam pasal dan mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

4. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam ketentuan Pasal 2 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu²⁰ :

- a. Asas manfaat, dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

²⁰ Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, hal. 210-211.

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Bab II undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Tinjauan tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.²¹ Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.

²¹ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001. hlm. 281.

- e. Tidak menarik dana secara langsung.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.²²

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

2. Peranan Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.²³

3. Bidang usaha lembaga Pembiayaan

a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kata *leasing* sebenarnya berasal dari to lease (inggris) yang berarti menyewakan. Istilah lainnya dari *leasing* adalah Sewa Guna Usaha. *Leasing* sebagai suatu kegiatan dapat dikatakan masih baru atau muda dalam kegiatan yang dilakukan di Indonesia yaitu baru dipakai pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan

²² *Ibid*

²³ Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*,. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM. 1996. hlm. 1.

Leasing yang statusnya sebagai suatu lembaga keuangan non bank. Fungsi Leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun hingga lima tahun).

Sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang leasing. Namun demikian praktek bisnis leasing telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum mempunyai pegangan yang jelas dan pasti, pada tahun 1974 telah di keluarkan Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: Kep-122/MK/IV/1/1974; No.32/M/SK/2/1974; dan No.30/Kpp/I/1974, Tertanggal 7 februari 1974.

Dalam surat keputusan bersama di atas, yang di maksudkan dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah di sepakati bersama.

Kegiatan leasing dapat dilakukan secara finance lease maupun secara operating lease. Yang dimaksud finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak

mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah di sepakati bersama. Sedangkan operating lease adalah suatu kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha (Edy Pramono, 1988: 38-39). Sebelum memulai kegiatan usaha di bidang leasing ini akan di dahului dengan suatu kontrak antara pihak penyewa dan pihak menyewa.²⁴

Dengan demikian menurut Richard Burton Simatupang (1996;127), bahwa dalam usaha *leasing* terdapat 4 (empat) pihak yang saling terkait dalam perjanjian *leasing* yaitu:

- a. *Lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak yang menyewakan ini disebut juga sebagai *investor*, *equity-holders*, *owner-participant* atau *trusters-owner*.
- b. *Lesee*, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa dan mempunyai hak opsi
- c. Kreditur atau *Lender* atau disebut juga *debt-holders* atas *loan participants* dalam transaksi *leasing*. Mereka umumnya terdiri atas dari bank, *insurance company* (Perusahaan asuransi), *trust*, yayasan.
- d. *Supplier*, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. *Supplier* ini dapat terdiri dari perusahaan (*manufacturers*) yang

²⁴ Rahayu Hartini, 2010, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press. Hal. 47

berada didalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

D. Tinjauan perkara perdata perlindungan konsumen

1. Perkara Perdata di BPSK

Sengketa konsumen disini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya suatu sengketa/perkara kedepan BPSK. berdasarkan Asas hukum yang berbunyi *point d'interet*, *point d action* (tiada kepentingan, maka tidak ada aksi) menggambarkan bahwa gugatan diajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar. Melihat inisiatif dari pada pihak sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang–Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara khusus pengertian sengketa konsumen. Rumusan sengketa konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah: “sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”

a. Pengertian BPSK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha

dan konsumen.²⁵ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.²⁶ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²⁷

b. Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. SK. Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)²⁸ yaitu :

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, arbitrase;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

²⁵ Edwin Kristanto. 2014 . *Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi di Yogyakarta* Jurnal Program Studi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

²⁶ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2002), Hlm.38.

²⁷ *Ibid*, Hal. 9

²⁸ Pasal 44 (Surat) Keputusan Mendripag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengamanatkan agar setiap orang mengetahuinya, maka diperintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) nomor berapa dan tahun berapa

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 5) Menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/ atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 9) Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- 10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

c. Tata cara penyelesaian perkara perlindungan konsumen

Tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing). Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima kepada pemohon. Permohonan yang diajukan secara tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima, bahwa permohonan telah diajukan. Berkas permohonan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

d. Pemeriksaan dan Putusan BPSK

Dalam hal permohonan diterima, maka dilanjutkan dengan persidangan, ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Dalam surat panggilan dicantumkan secara jelas mengenai waktu, hari, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama, yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan, dan dalam persidangan majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan. Pemohon dalam mengajukan penyelesaian sengketa dapat memilih berbagai cara yaitu Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase.

Menurut pendapat Frans Winarta dalam bukunya (hal. 7-8)²⁹ menguraikan pengertian masing-masing cara penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:

²⁹ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

- 1) Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- 2) Mediasi cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- 3) Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis.

Putusan majelis BPSK dapat dibedakan atas dua jenis putusan, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu :

1. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi, putusan ini pada dasarnya hanya mengukuhkan isi perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Putusan BPSK dengan cara arbitrase, seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya.

Putusan majelis BPSK sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata hasilnya tidak berhasil mencapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan mediasi dan konsiliasi tidak memuat sanksi administratif sedangkan arbitrase dibuat dengan putusan majelis dan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis, keputusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif. Putusan BPSK dapat memuat; perdamaian, gugatan ditolak atau gugatan dikabulkan.

Terhadap putusan BPSK, ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi, yakni putusan dilaksanakan secara sukarela atau putusan tersebut dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Pasal 42 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa putusan BPSK yang telah final dan mengikat dimintakan penetapan eksekusinya oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan. Ketentuan Pasal ini, bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata pada umumnya yang mengatur bahwa pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim, yang memohon kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan eksekusi baik secara tertulis atau secara lisan.

Pasal 47 UUPK bahwa penyelesaian sengketa di BPSK pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan

untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Remy Sjahdeini berpendapat bahwa dalam menafsirkan ketentuan dari Pasal 52 huruf k UUPK, harus dihubungkan dengan Pasal 57 dan Pasal 52 huruf a UUPK. Menurut Pasal 57 UUPK, putusan Majelis BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Ketentuan tersebut memberi petunjuk bahwa putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh BPSK apabila gugatan dikabulkan haruslah berisi amar/diktum *condemnatoir*, untuk dapat dieksekusi. Agar dapat dijatuhkan amar *condemnatoir*, harus dilandasai putusan memuat amar tentang besarnya ganti kerugian yang pasti (*fixed remedy, fixed damage*).³⁰

Dalam hal pelaku usaha menerima isi atau amar putusan BPSK, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPK ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK. Adapun yang menentukan bahwa pelaku usaha menerima isi putusan BPSK berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPK adalah dengan tidak diajukannya upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri yang oleh karenanya membawa akibat hukum Putusan BPSK berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selanjutnya,

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2000, *Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, makalah, hal 9

dalam rangka melaksanakan (eksekusi) isi atau amar Putusan BPSK, berdasarkan Pasal 57 UUPK terhadap Putusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dimintakan suatu Penetapan Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini domisili Konsumen yang dirugikan melalui mekanisme permohonan fiat eksekusi.

Norma hukum ini merupakan salah satu upaya penghormatan terhadap lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri. BPSK memang bukanlah suatu lembaga peradilan, akan tetapi ia lebih merupakan suatu lembaga quasi rechtspraak yang putusannya baru dapat dieksekusi setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan fiat eksekusi. putusan BPSK yang dapat di eksekusi hanyalah putusan BPSK yang memuat besarnya ganti kerugian, dan tidak melanggar atau melampaui asas ultra petita yang ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu putusan tidak boleh melebihi yang diminta dalam petitum.

Dengan merujuk pada pasal 49 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 2 SK. Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 fungsi utama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu : sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

Jadi perlu di ambil kesimpulan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Putusan yang bersifat non-litigasi (diluar pengadilan) yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Perkara perdata di pengadilan

Menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herzine Inland Regeling* (HIR) atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg), yang mana keduanya pada dasar tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipil).

a. Gugatan

Pada dasarnya gugatan terbagi dua macam diantaranya adalah gugatan *voluntair* (Permohonan) dan gugatan *contentiosa* (Bersengketa). Akan tetapi disini penulis membahas lebih detail tentang gugatan yang bersengketa.³¹

Gugatan *contentiosa* ialah gugatan sifatnya dimana para pihak bersengketa atau berselisih antara penggugat dan tergugat. Gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Sedang penggunaan gugatan *contentiosa*, lebih bercorak pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan dengan gugatan *voluntair*. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.

- 1) Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan *istilah gugatan perdata*. Akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya disebut *gugatan atau gugat saja* (seperti dalam pasal 119, 120, dan sebagainya).

³¹ Yahya Harahap, 2013, *Hukum acara perdata, Jakarta, Sinar Grafika*. Hlm 47

- 2) Pasal 1 Rv menyebut *gugatan (tiap-tiap proses perkara perdata....., dimulai dengan sesuatu pemberitahuan gugatan...)*. Namun jika pasal itu dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan adalah gugatan perdata.

Prof. Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.

Begitu juga dengan Prof. R. Subekti, mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan. Dengan demikian setiap perkara perdata, diajukan ke PN dalam bentuk surat gugatan. Begitu pula halnya dalam praktik peradilan.

Yang dimaksud dari gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak³²:

- 1) Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat
- 2) Sedangkan yang di tarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat. Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata :
- 3) Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.

³² *ibid.*

- 4) Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,
- 5) Berarti gugatan perdata bersifat partai, dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.

b. Pembuktian dan Pemeriksaan

Pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum.

1) Prinsip Umum Pembuktian

Prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian.

2) Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang, seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut mencari kebenaran:

a) Harus di buktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil.

b) Dan diatas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan wujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berpekara. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat.

3) Tugas dan peran hakim bersifat pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas :

a) Mencari dan menemukan kebenaran formal

b) Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

4) Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa adanya pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkan gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Bukti yang diajukan dipersidangan harus mampu membuktikan fakta konkret yang langsung berkaitan dengan materi pokok perkara yang dipersengketakan.

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan masalah hukumnya tidak usah dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim. Dalam acara perdata di Indonesia, hakim adalah terikat di dalam acara mencapai putusannya. Hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah, hakim diperbolehkan mengambil keputusan.

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain pembuktian yang tidak lain penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah *judex factie* saja. Dengan demikian bukti itu dinilai lengkap dan sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah

diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti dan benar.

Namun demikian, oleh karena sampai sekarang hukum pembuktian di Indonesia ini belum mengalami pembaharuan seperti yang terjadi di beberapa Negara lainnya, para pihak yang berperkara maupun hakim masih berpegang pada system lama karena sampai sekarang pengadilan belum berani melakukan terobosan menerima alat bukti baru, diluar yang disebutkan Undang-Undang³³

5) Macam- macam alat bukti

Menurut Pasal 164 HIR/ 1866 KUH Perdata, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang artinya hakim hanya boleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang adalah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

6) Beban Pembuktian

Pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW yang menentukan :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau

³³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hal 556

untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”

7) Tujuan Pembuktian

Pada hakekatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.

Menurut teori Hans Kelsen yang kemudian diikuti oleh Paul Scholten itu, tindakan yang dilakukan seseorang sehingga ia dihukum, bukan merupakan hubungan sebab akibat. Artinya bahwa hukuman yang diterimanya bukanlah akibat dari perbuatannya, melainkan bahwa hukuman itu merupakan pertanggung jawaban atau perbuatannya sendiri.

Oleh karena itu, pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu, maka disini terbukti lagi betapa besarnya peranan hukum pembuktian didalam menentukan kalah menangnya pihak-pihak yang berperkara.

Sebagai tujuan akhir dari pembuktian itu tentu saja sejalan dengan tujuan dari hukum pada umumnya, di sini kita harus ingat lagi, bahwa hukum pembuktian hanya subsistem dari sistem hukum secara keseluruhan.

Apakah tujuan hukum itu? Tujuan hukum adalah:

- a) Gerachtgkeit (keadilan)
- b) Zwegkmassigkeit (kemanfaatan)
- c) Rechtsicherheit (kepastian hukum)

Hukum itu timbul pada hakikatnya disebabkan karena terjadinya konflik diantaranya berbagai kepentingan manusia (conflict of human interest). Akibat konflik antar-kepentingan itu sehingga menghendaki adanya penyelesaian fungsi hukum.

Khususnya hukum acara perdata, tujuan pembuktian di dalamnya untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara. Kita selalu harus ingat, bahwa proses perdata adalah proses penyelesaian persengketaan antara dua pihak. Berbeda dengan proses pidana, dimana tidak terdapat persengketaan antara jaksa dan terdakwa.

Oleh Karena itulah selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara³⁴, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya.

³⁴ Dahrie globe, *PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA*, <http://sayetmdahri.blogspot.co.id/2015/02/pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata.html>, di akses tanggal 24 Mei 2017

8) Pemeriksaan Setempat

Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat, namun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Sumber formil dari pemeriksaan setempat ini adalah ada pada pasal 153 HIR yang diantaranya memiliki maksud sebagai berikut :

Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang dapat dipindahkan ke tempat objek yang diperkarakan.

- a) Persidangan ditempat seperti itu bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut ditempat barang itu terletak.
- b) Dan yang melakukannya adalah dapat seorang atau dua orang anggota Majelis yang bersangkutan dibantu oleh seorang panitera.

Pengertian Sekedar gambaran, ada baiknya dikemukakan bunyi pasal 153 HIR.

- (1) Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan ditempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.

(2) Panitera pengadilan hendaklah membuat berita tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu

Dari bunyi pasal diatas, Majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang berarti:

- (a) Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan diruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan ditempat lain, yaitu di tempat letak objek barang perkara,
- (b) Persidangan ditempat itu, bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut atau memeriksa objek itu ditempat barang itu terletak,
- (c) Dan yang melakukan persidangan ditempat itu, bisa salah seorang atau dua orang anggota majelis yang bersangkutan, di bantu oleh seorang panitera

Tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang perkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenaikuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah kualitasnya.

c. Pertimbangan dan Putusan

1) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hukum Dari Hakim Pertimbangan hukum dari hakim atau *ratio decidendi* adalah argument/alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³⁵

Ratio decidendi (Jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “*the reason*” atau “*the rationale for the decision.*” *Black’s Law Dictionary* menyatakan *Ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgment*” atau menurut *Barron’s Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes.*” Kusumadi Pudjosewojo dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*material fact*, faktor-faktor yang esensiil yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu.³⁶

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat

³⁵ I.P.M. Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Cetakan Ketiga,, Jakarta: Sinar Grafika hal. 475.

³⁶ *Ibid.*

tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.³⁷

Pertimbangan hukum seorang hakim tidak kalah penting dibandingkan dengan amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan hukum itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum cukup menjadi alasan untuk diajukan upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁸

Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting

³⁷ Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

³⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 140.

dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁹

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum, maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan "*ratio decidendi*."

2) Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan di

³⁹ *Ibid*, hal. 141.

⁴⁰ Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty hal.175.

ajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dari pasal 121 HIR, yang dibarengi dengan Replik dari Penggugat, maupun Duplik dari Tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.

Setelah hakim memahami duduk perkaranya yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian hakim akan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut.

a) Macam-Macam Putusan

1. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 tingkatan pemeriksaan. Yaitu pemeriksaan pada tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan pada banding pengadilan tinggi dan pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.⁴¹ Sedangkan menurut sifatnya dikenal 3 macam putusan, diantaranya:

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* merupakan pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu hak dan titel maupun status. Oleh sebab itu pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, putusan

⁴¹ Riduan Syahrani, 2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal.39.

telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.⁴²

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* merupakan putusan yang menyatakan perjanjian batal, pada dasarnya amar berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif yakni yang berisi perjanjian itu tidak sah oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.⁴³

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, dimana pihak Tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya guna membayar hutang.⁴⁴ Putusan *Condemnatoir* memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat *Condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif dan konstitutif karena amar tersebut dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan.⁴⁵

⁴² M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hal 876

⁴³ *Ibid*, hal 877

⁴⁴ Sutanto, Retno Wulan, Oeripkartawinata, Iskandar, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hal 109.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, Hal 877

2. Putusan Sela

Di samping putusan akhir masih dikenal putusan yang bukan putusan akhir atau disebut juga putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.⁴⁶

Putusan sela ini menurut Pasal 185 ayat 1 HIR yang berbunyi, keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan.⁴⁷ Berikut merupakan macam-macam putusan sela:

a. Putusan *prepatoir*

Putusan *prepatoir* merupakan putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas perkara atau putusan akhir.

b. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* merupakan putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan yang *insidentil* belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti misalnya putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.

⁴⁶ Soedikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 193

⁴⁷ R. Soesilo, 1989, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: PT Karya Nusantara, Hal. 137.

c. *Putusan Provisionil*

Putusan *provisionil* merupakan putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara ditiadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kesalahan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka, oleh demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkin untuk diperiksa ulang agar kesalahan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan:

a. *Perlawanan (Verzet)*

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap Putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat. Menurut pasal 129 HIR ayat 1 yaitu Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir (*Vertsek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu.⁴⁸

b. *Banding*

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan negeri karena merasa hak-

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 86.

haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan banding adalah pihak yang berkepentingan. Hal berarti, bahwa pihak yang dikalahkan yaitu yang gugatnya tidak diterima atau ditolak saja.

Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskn itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu berdasarkan keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁹ Dengan diajukannya banding, otomatis perkara menajdi mentah lagi atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah salah satu pihak menyatakan banding dan dicatat oleh panitera, maka pihak lawan diberitahu oleh panitera, tentang permintaan banding itu selambat-lambat 14 (empat belas) hari setelah permintaan banding diterima dan kedua belih pihak diberi kesempatan untuk melihat surat-surat serta berkasnya di pengadilan negeri selama 14 (empat belas) hari. Kedua belah pihak boleh memasukan surat keterangan dan bukti-bukti baru,

⁴⁹ Soedikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 197

sebagai uraian dari pada alasan pemohon banding yang biasa disebut memori banding kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan terbanding dapat menjawab memori itu dengan kontra memori banding kemudian salinan putusan serta surat-surat pemeriksaan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permohonan banding.⁵⁰ Dalam tingkat banding pun hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada yang di tuntut satau memutuskan hal-hal yang tidak dibantah dalam tingkat banding.⁵¹

c. Prorogasi

Prorogasi merupakan pengajuan suatu perkara berdasarkan persetujuan kedua pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau seharusnya diajukan kepada pengadilan peradilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Maka dalam hal prorogasi perkara atau sengketa itu dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa diajukan kepada pengadilan tinggi atau pengadilan dalam peradilan tingkat banding.⁵²

Sengketa yang dapat dimintakan pemeriksaan ulang dapat dimintakan pemeriksaan dalam tingkat pertama kepada

⁵⁰ Soedikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 198

⁵¹ *Ibid*, hal. 200

⁵² *Ibid*.

pengadilan banding asal oleh pihak-pihak yang bersengketa telah di setujui dengan suatu akta untuk mengajukan sengketa mereka sejak permulaan kepada pengadilan banding tersebut. pengadilan banding yang memeriksa sengketa dalam prorogasi bertindak sebagai badan pengadilan dalam peradilan tingkat pertama.⁵³

d. Kasasi

Kasasi berasal dari peralatan Prancis “*Casser*” yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahan itu diterima oleh mahkamah agung, maka hal itu berarti, bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh mahkamah agung karena karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.⁵⁴

Kasasi adalah tindakan mahkamah agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi.⁵⁵

Kasasi merupakan salah satu tindakan mahkamah agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain yang lebih rendah tingkatannya.⁵⁶

⁵³ *Ibid* hal. 201

⁵⁴ Sutanto, Retno Wulan, Oeripkartawinata, Iskandar, *Op.cit*, hal. 163

⁵⁵ R Soepomo, 1958, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Frasco, hal. 168.

⁵⁶ Projudikoro Wirojo, 1970, *Hukumm Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung: Sumur, hal 118.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri atau orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang kemudian diajukan secara lisan maupun panitera pengadilan negeri yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan yang dimaksud terbitkan kepada pemohon. Apabila didalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah lewat tanpa ada permohonan kasasi dari pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut dianggap telah menerima putusan yang bersangkutan.⁵⁷

4. Asas Putusan

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *anvolfoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*).⁵⁸

Selain itu, majelis hakim wajib mengucapkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak

⁵⁷ Ridwan Syahrani, *Op.cit*, hal. 76.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 797.

dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat.⁵⁹

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- 2) Hukum kebiasaan;
- 3) Yurisprudensi; atau
- 4) Doktrin hukum.⁶⁰

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja, dan mengabaikan gugatan yang selebihnya.⁶¹

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 (2) RBH, dan pasal 50Rv. Putusan harus secara total dan

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 798.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 797-798.

⁶¹ Soeroso, 1996, *Praktek Hukum Acara Perdata*, Tata Cara Persidangan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 81

menyeluruh memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.⁶²



⁶² *Ibid*, hal. 800.